

Menteri PU Sampaikan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Jalan



Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto hari ini menyampaikan 10 pokok-pokok pikiran yang termuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Jalan Inisiatif DPR-RI mengenai revisi/perubahan terhadap UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Pemerintah (4/12).

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian PU telah melakukan pembahasan RUU Jalan Inisiatif DPR RI dan menyusun DIM bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pakar Perguruan Tinggi/Akademisi dan Asosiasi Profesi,” kata Djoko Kirmanto.

Dalam raker tersebut, turut hadir Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Sekjen Kementerian PU Agoes Widjanarko, Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto, Inspektur Jenderal Kementerian PU Basoeki Hadimoeljono dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat.

Diketahui bahwa hasil pembahasan pemerintah tersebut telah tersusun 736 DIM, namun dalam raker dengan Komisi V hari ini Djoko menyampaikan 10 pokok-pokok pikiran yang termuat dalam DIM tersebut.

“Ini adalah prakarsa DPR, yang merasa itu (UU No. 38 Tahun 2004) perlu diubah, kami memberikan DIM dan disimpulkan sepuluh tadi, apabila sepuluh masalah tadi belum disepakati, kami tidak nyaman uu itu diubah, kecuali yang sepuluh tadi dibahas habis,” tutur Djoko Kirmanto usai raker.

Selanjutnya Djoko mencontohkan salah satu isi UU jalan inisiatif DPR, yaitu mengenai 10 persen dari APBN dan APBD dialokasikan untuk jalan, hal ini perlu dikaji lebih mendalam lagi karena akan menimbulkan masalah dan mempengaruhi alokasi bidang lainnya, seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

“Khusus itu kami tidak bisa menyepakati, tapi yang lain-lain kami pertanyakan dan yang lainnya apabila ada perubahan sedikit bisa saja, untuk itu nanti akan kita bahas bersama,” tambah Djoko.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Mulyadi menjelaskan beberapa isi RUU jalan inisiatif DPR tersebut diantaranya adalah mengenai konsep-konsep pembangunan jalan, bagaimana kontraktor yang membangun jalan bertanggung jawab minimal 5 tahun seperti Performance Based Contract (PBC) yang saat ini telah diuji coba oleh Kementerian PU.

•Selain itu juga di undang-undang nanti kita perjelas, dan bagaimana sistem drainase kita itu, bagaimana pembangunan jalan kita itu wajib dibangun drainase, baik existing maupun jalan baru, sehingga sesuai dengan umurrencana,• tutur Mulyadi.

Mulyadi menilai uu tentang jalan saat ini terlalu fokus mengenai jalan dan aturan tentang jembatan tidak terlalu banyak diakomodasi sama halnya dengan terowongan kita nyaris tidak punya terowongan padahal Mulyadi mengatakan pembangunan terowongan termasuk ramah lingkungan dan tentu memperpendek panjang jalan.

Diketahui, bahwa DPR RI telah menyampaikan RUU Jalan pada tanggal 27 Maret 2012 kepada Presiden RI dan Presiden RI telah menunjuk beberapa Menteri sebagai wakil Pemerintah baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Presiden RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Jalan, yaitu: Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri. (nrm)

Pusat Komunikasi Publik

041212